

Nama : Danu Akta Alam

NPM : 2413031052

Kelas : B

CASE STUDY

PT Garuda Sejahtera adalah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak di bidang penerbangan. Dalam laporan keuangan terbarunya, perusahaan mengakui pesawat-pesawat yang dimiliki berdasarkan **nilai wajar (fair value)** sesuai dengan pendekatan IFRS (International Financial Reporting Standards).

Namun, auditor memberikan catatan bahwa penentuan nilai wajar tersebut tidak mencerminkan kondisi pasar di Indonesia secara akurat, karena pasar aktif untuk pesawat di Indonesia sangat terbatas. Auditor menyarankan agar perusahaan mempertimbangkan penggunaan **biaya historis (historical cost)** yang lebih konservatif.

Sementara itu, PT Garuda Sejahtera menyatakan bahwa pendekatan nilai wajar lebih mencerminkan "**substance over form**" dan **kebutuhan investor global**, karena perusahaan ingin menarik investor asing. Dalam penyusunannya, perusahaan mengacu pada **kerangka konseptual IFRS**, bukan **kerangka konseptual PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)**.

Beberapa anggota dewan komisaris mempertanyakan:

1. Apakah penggunaan kerangka konseptual global (IFRS) sah diterapkan untuk perusahaan di Indonesia?
2. Apakah kerangka konseptual PSAK sudah cukup memadai untuk menjawab dinamika bisnis global?
3. Apakah nilai wajar benar-benar mencerminkan realitas ekonomi yang bisa diandalkan dalam konteks Indonesia?

Pertanyaan:

1. **Kritisi keputusan PT Garuda Sejahtera dalam memilih nilai wajar sebagai dasar pengukuran. Apakah keputusan tersebut dapat dibenarkan secara konseptual dalam konteks Indonesia? Jelaskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam kerangka konseptual PSAK dan IFRS.**
2. **Bandingkan kerangka konseptual PSAK (Indonesia) dan IFRS dalam hal:**
 - Tujuan laporan keuangan
 - Karakteristik kualitatif informasi

- Basis pengukuran
 - Asumsi entitas dan kelangsungan usaha
3. **Apakah Anda setuju bahwa Indonesia sebaiknya mengikuti sepenuhnya kerangka konseptual IFRS tanpa penyesuaian lokal? Jelaskan pendapat Anda dengan argumen kritis, mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan tingkat kematangan pasar di Indonesia.**

Jawaban :

1. Kritisi keputusan PT Garuda Sejahtera memilih nilai wajar

Keputusan PT Garuda Sejahtera untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran dapat dibenarkan secara konseptual karena metode ini dianggap lebih relevan bagi investor internasional dan mencerminkan nilai ekonomi terkini. Namun, dalam konteks Indonesia keputusan ini perlu dikritisi. Pasar pesawat di Indonesia tidak aktif sehingga penentuan nilai wajar sangat bergantung pada asumsi dan model penilaian yang subjektif. Hal ini dapat menurunkan keandalan dan representasi setia dari laporan keuangan. Prinsip dalam kerangka konseptual PSAK menekankan keseimbangan antara relevansi dan keandalan, sehingga penggunaan biaya historis mungkin lebih tepat jika data pasar tidak tersedia secara objektif. Auditor benar menyoroti risiko penilaian yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Oleh karena itu, penggunaan fair value hanya dapat dibenarkan jika perusahaan memiliki dasar penilaian yang transparan, independen, dan dapat diverifikasi.

2. Perbandingan kerangka konseptual PSAK dan IFRS

• **Tujuan laporan keuangan**

PSAK bertujuan menyediakan informasi bagi investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lain untuk pengambilan keputusan ekonomi serta kepatuhan terhadap regulasi nasional. IFRS berfokus pada penyediaan informasi yang berguna bagi investor global dan pasar modal internasional.

• **Karakteristik kualitatif informasi**

Kedua kerangka mengutamakan relevansi dan representasi setia. IFRS lebih menonjolkan relevansi dan penggunaan nilai wajar, sedangkan PSAK cenderung lebih konservatif demi menjaga keandalan data.

• **Basis pengukuran**

IFRS mendukung berbagai basis pengukuran termasuk nilai wajar jika dapat diandalkan, sedangkan PSAK masih mengutamakan biaya historis karena lebih stabil dan sesuai dengan kondisi pasar domestik.

- **Asumsi entitas dan kelangsungan usaha**

Keduanya sama-sama menggunakan asumsi entitas ekonomi dan kelangsungan usaha. Perbedaannya, PSAK menekankan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi risiko dalam pasar yang belum sepenuhnya efisien.

3. Pendapat tentang adopsi penuh IFRS di Indonesia

Saya tidak setuju jika Indonesia sepenuhnya mengikuti kerangka konseptual IFRS tanpa penyesuaian lokal. Tingkat kematangan pasar keuangan Indonesia belum sebanding dengan negara-negara maju sehingga pengukuran berbasis nilai wajar dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi manipulasi laporan. Dari sisi sosial dan ekonomi, penerapan penuh IFRS juga dapat menyulitkan perusahaan kecil dan menengah yang belum memiliki sumber daya atau penilai independen. Penyesuaian lokal diperlukan agar standar tetap relevan, realistis, dan selaras dengan kondisi pasar serta sistem hukum Indonesia. Pendekatan terbaik adalah mengadopsi prinsip IFRS secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku pasar, kapasitas auditor, dan kebutuhan pemangku kepentingan domestik.